KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	CAHYO WIDODO
NIK	:	[redacted]
Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja	:	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
Sub Unit Kerja	:	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA
Jabatan	:	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Jenis Laporan	:	Periodik - 2025
Tanggal Kirim	:	9 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-06-05 18:04:57

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

2025

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **YUDIKATIF**

LEMBAGA : **MAHKAMAH AGUNG**

UNIT KERJA : **PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CAHYO WIDODO**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **878351**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	**Rp.**	**450.000.000**
1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	**Rp.**	**245.000.000**
1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	**Rp.**	**9.000.000**
D. SURAT BERHARGA	**Rp.**	**----**
E. KAS DAN SETARA KAS	**Rp.**	**10.000.000**
F. HARTA LAINNYA	**Rp.**	**----**
Sub Total	**Rp.**	**714.000.000**
III. HUTANG	**Rp.**	**50.000.000**
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	**Rp.**	**664.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.